



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR: 188.45- 784 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017;
 - c. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,



Yuslih Ihza
YUSLIH IHZA

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017**

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5		6	7		8	9
1.	Perda	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Perubahan perijinan, tempat penjualan dan sanksi	√		permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol permendag Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	√		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitung Timur/ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
2.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu	Tempat Penjualan dan Besaran Tarif Retribusi Minuman Beralkohol		√	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitung Timur/ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)

									Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	
3.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Besaran Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang		√	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		√	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Belitung Timur/ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
4.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan		√	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	√		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung Timur/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
5.	Perda	Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur		√		-	√		Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kab. Belitung Timur/ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)

6.	Perda	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah	Pencabutan Perda	√		Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah	√	Bagian Hukum Setda. Kab. Belitung Timur/ Bidang Administrasi Umum Setda. Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
7.	Perda	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pencabutan Perda	√		Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	√	Bagian Hukum Setda. Kab. Belitung Timur/ Bidang Administrasi Umum Setda. Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
8.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	Perubahan Perda		√	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pencabutan sebagian Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	√	Bagian Hukum Setda. Kab. Belitung Timur/ Bidang Administrasi Umum Setda. Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
9.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034	Perubahan Perda		√	UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	√	DPRD Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)

10.	Perda	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Perlindungan tenaga kerja lokal	√		UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	√	DPRD Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
11.	Perda	Penanggulangan Kenakalan Remaja	Penanggulangan kenakalan remaja	√		-	√	DPRD Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan I (1 Januari-30 April 2017)
12.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Penambahan Objek dan Perubahan Tarif Retribusi		√	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	√	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan II (1 Mei-30 Agustus 2017)
13.	Perda	Penetapan Hari Jadi Kota Mangar	Penetapan hari jadi Kota Manggar	√		-	√	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah/ Dinas Perpustakaan Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan II (1 Mei-30 Agustus 2017)
14.	Perda	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur	Perubahan Pasal 8 ayat (2), bahwa dalam melaksanakan kerjasama BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur tidak diwajibkan untuk melalui persetujuan DPRD.		√	- UU No 40 Tahun 2007	√	Bagian Ekbang Setda. Kab. Beltim/ Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Beltim	Masa Persidangan II (1 Mei-30 Agustus 2017)
15.	Perda	Perlindungan Sosial Suku Sawang	Perlindungan sosial suku sawang	√		-	√	DPRD Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan II (1 Mei-30 Agustus 2017)
16.	Perda	Jam belajar Masyarakat	Jam belajar masyarakat	√		-	√	DPRD Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan II (1 Mei-30 Agustus 2017)

17.	Perda	Tempat Pelelangan Ikan	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	√		UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	√		Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Belitung Timur	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
18.	Perda	Desa	Penyelenggaraan Desa dan BPD	√		UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	√	√	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Beltim/ Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
19.	Perda	Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan Lokal Kelapa Kampit	RDTR PKL Kelapa Kampit	√		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah	√		Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
20.	Perda	Rencana Induk Pembangunan Pertanian	Pembangunan Pertanian	√		UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang RPJMN	√		Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
21.	Perda	Rencana Induk Perikanan	Penyusunan Masterplan Perikanan meliputi Perikanan Tangkap dan Budidaya	√		UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	√		Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)

22.	Perda	Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA)	RIPIDA mencakup sasaran pembangunan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri serta sarana dan prasarana industri	√		UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	√		Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
23.	Perda	Kepariwisataan	Pembangunan Kepariwisataan	√		UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	√		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
24.	Perda	Pelestarian Budaya Daerah dan Lembaga Adat Melayu Belitong		√		-	√		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
25.	Perda	Rencana Detail Tata Ruang Pusat Kegiatan Lokal Gantung	RDTR PKL Gantung	√		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah	√		Bappeda/ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Beltim	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)

II. RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Perda	Pertanggung jawaban APBD TA.2016	Hasil LKPD Audit TA. 2016	√		Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	√	DPPKAD	Masa Persidangan II (1 Mei-30 Agustus 2017)	
2.	Perda	Perubahan APBD TA.2017	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) DPPA-SKPD		√	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	√	DPPKAD	Masa Persidangan II (1 Mei-30 Agustus 2017)	

3.	Perda	APBD TA.2018	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DPA-SKPD	√		√	DPPKAD	Masa Persidangan III (1 September-31 Desember 2017)
----	-------	--------------	--	---	--	---	--------	---



 BUPATI BELITUNG TIMUR,
 YUSLIH IHZA